

Latar Kebijakan Politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II (1876-1909)

Afifah Alawiyah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia

Afifahalawiyah21@gmail.com

Muhammad Faiz

faiz_spi@uinkhas.ac.id

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia

Article Info	Abstrak
<p>Kata Kunci: Kebijakan Politik; Pan-Islamisme; Sultan Abdul Hamid II</p>	<p>Sultan Abdul Hamid II diangkat menjadi Khalifah Dinasti Utsmaniyah pada tanggal 31 Agustus 1876. Masa kepemimpinan para sultan sebelum Abdul Hamid II berkuasa lebih condong ke arah Barat dan menyebabkan Kekhalifahan Utsmaniyah mengalami berbagai permasalahan terutama westernisasi dan sekularisasi yang berdampak pada dinamika politik, sosial dan agama. Sultan Abdul Hamid II membawa pendekatannya sendiri dalam kepemimpinannya dengan tujuan memulihkan stabilitas Kesultanan Utsmaniyah dan memperkuat umat Islam dengan kebijakan politik Pan-Islamisme. Visi Pan-Islamisme sebagai sarana untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia, selaras dengan strateginya yang lebih luas untuk menstabilkan Turki Ottoman selama periode tantangan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis kritis terkait sejarah Kesultanan Utsmaniyah, memadukan teknik penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan referensi dari buku, jurnal, artikel, tesis, dan literatur lain yang relevan terkait sejarah Kesultanan Turki Utsmaniyah. Kebijakan Pan-Islamisme. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa latar belakang munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Turki Usmani pada masa Sultan Abdul Hamid II didasarkan pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal didorong oleh kemunduran Turki Usmani pasca kekalahan perang. Sedangkan faktor eksternal antara lain pengaruh pemikiran Barat di lingkungan Kekhalifahan Ottoman dan penyebaran kolonialisme Barat di negara-negara Islam</p>

Pendahuluan

Dalam berbagai catatan sejarah, diketahui bahwa asal usul Kesultanan Utsmani dimulai sebelum tahun 1300 Masehi.¹ Entitas tangguh ini pertama kali muncul di bawah kepemimpinan Osman Gazi bin Ertugrul, seorang tokoh terkemuka di wilayah Turki abad pertengahan. Osman dan pasukannya meraih kemenangan penting melawan 2.000 tentara Kristen Bizantium, kemudian

¹ Masudul Hasan, *History of Islam Vol II* (Delhi: Adam Publisher and Distributer, 1995), 572

menguasai kota Nicea (Iznik) pada tahun 1302 M. Momen penting ini menjadi tonggak berdirinya Dinasti Utsmaniyah yang kemudian dipimpin oleh para keturunan Osman Ghazi.² Luas wilayah Kesultanan Utsmaniyah cukup luas, meliputi Semenanjung Balkan, Asia Kecil, Arab Timur Tengah, Mesir, dan Afrika Utara.³

Dalam konteks yurisprudensi Islam, khilafah mewakili entitas politik yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan Islam berfungsi sebagai kerangka dasar negara. Misi kekhalifahan melibatkan penyebaran Islam secara global melalui dakwah dan jihad (perjuangan).⁴ Menurut teks fundamental dalam mazhab Syafi'i, seperti dalam kitab *Fath al-Qarib*, jihad dianggap sebagai kewajiban komunal yang dilakukan setiap tahun.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa negara-negara Islam, sejak zaman Nabi Muhammad hingga Kesultanan Utsmaniyah, menganjurkan ekspansi militer ke *Dar al-harb* (wilayah non-Muslim) hingga masuk Islam atau tunduk pada Khilafah, disertai dengan pembayaran sejumlah pajak atau *jizyah* bagi non-Muslim.

Seperti pada masa Sultan Salim I yang berhasil menaklukkan Mamluk di Mesir dan mewarisi jabatan khalifah dari Daulah Abbasiyah pada tahun 1517 M, ia juga mendapatkan kewenangan untuk menjadi "Pelayan Dua Tanah Suci". Jadi, selain berhak untuk mengontrol Mekkah dan Madinah sebagai ritus umat Islam sedunia untuk melaksanakan ibadah haji, Daulah Utsmaniyah juga berkewajiban untuk mengamankan rute-rute menuju Tanah Suci, khususnya rute Laut Merah dan Samudera Hindia. Hal ini membuat khalifah harus berhadapan dengan armada laut Portugis yang saat itu mencoba merebut kontrol perdagangan internasional di perairan Samudera Hindia.⁵

Konsep khilafah, yang dihormati oleh para ulama sebagai institusi yang menjaga agama dan mengawasi urusan global, mengalami pengikisan bertahap pada otoritasnya pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid I (1823-1861 M).

² Halil Inalcik, *The Utsmani Empire: The Classical Age 1300-1600* (London: Phoenix, 1995), 6

³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 248

⁴ Taqi al-Din al-Nahbani, *Al-Dawlah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2002), 148

⁵ Andrew Peacock, *From Anatolia to Aceh* (Oxford University Press, 2015)

Sultan Abdul Majid I, penguasa Daulah Utsmaniyah, memprakarsai sebuah gerakan resmi menuju westernisasi dalam pemerintahan, menjadi ujung tombak penerapan sistem Tanzimat (Reformasi). Hal ini menandai era penting di mana kekhalifahan Utsmaniyah mengadopsi banyak undang-undang yang dipengaruhi oleh model-model Barat.⁶

Di bawah kebijakan Tanzimat, kekhalifahan Utsmaniyah melakukan serangkaian reformasi yang mencerminkan prinsip dan praktik seperti Barat. Sultan Abdul Majid I menganjurkan integrasi Negara Utsmaniyah ke dalam lingkup Eropa, mencari penerimaan dalam komunitas Eropa. Namun penerimaan ini datang dengan ketentuan yang ketat. Kesultanan Utsmaniyah diharuskan melepaskan Islam sebagai landasan hubungan internasionalnya dan mematuhi prinsip-prinsip "Hukum Publik Eropa".

Era Tanzimat menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Utsmaniyah, khususnya mengenai ekspansi militer dan pertahanan melawan dinasti Muslim lainnya yang berjanji setia kepada Istanbul. Kekuasaan Utsmani dibatasi kemampuannya untuk terlibat dalam inisiatif kebijakan luar negeri aktif, termasuk intervensi militer, karena kendala hukum internasional yang melarang campur tangan dalam urusan negara berdaulat.

Selain itu, kesultanan Utsmaniyah menghadapi keterbatasan dalam memberikan bantuan kepada umat Islam di luar wilayahnya yang menjadi sasaran pemerintahan kolonial Eropa. Setelah rentang waktu 22 tahun di bawah rezim Tanzimat pimpinan Sultan Abdul Majid I, tampuk kepemimpinan beralih ke Sultan Abdul Aziz (1830-1876 M). Masa jabatan Sultan Abdul Aziz mencerminkan masa jabatan pendahulunya, yang ditandai dengan keterlibatan diplomatik yang luas dengan rekan-rekannya di Eropa dan penerapan reformasi yang cenderung berpihak pada model pemerintahan Barat.

Pada tanggal 31 Agustus 1876 M, Sultan Abdul Hamid II mengambil peran sebagai Sultan Daulah Utsmaniyah, menggantikan Sultan Murad V.⁷ Sultan Abdul Hamid II melakukan pendekatan tersendiri pada awal masa

⁶ Muhammad Nicho Pandawa Trisakti, *Pasang Dan Surut Pengaruh Pan-Islamisme Khilafah Utsmaniyah Terhadap Hindia Belanda 1882-1928 (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020)*

⁷ Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam* (Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013), 148.

kekuasaannya, khususnya mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan seperti penggabungan cita-cita Barat ke dalam masyarakat Utsmaniyah. Berbeda dengan beberapa kalangan sezamannya yang ingin mengadopsi peradaban Barat secara menyeluruh, Sultan Abdul Hamid II menyimpan keraguan. Ia percaya bahwa dunia Timur memiliki peradaban yang kaya yang merupakan tandingan yang tangguh bagi Barat.

Dasar dari pemerintahan Sultan Abdul Hamid II yang menonjol adalah penolakannya yang gigih terhadap pengaruh Barat, terutama prinsip-prinsip demokrasi dan kerangka hukum yang ia anggap sebagai pengaruh asing yang infiltratif. Kebijakan Sultan Abdul Hamid II yang terbilang baru dalam bidang pendidikan mencakup reformasi pendidikan di mana sekolah-sekolah negeri ditempatkan di bawah pengawasannya secara langsung.

Ia memobilisasi lembaga-lembaga pendidikan untuk memupuk persatuan Islam dan berkolaborasi dengan sekte-sekte Sufi, mencari kesetiaan mereka kepada kekhalifahan Utsmaniyah. Kolaborasi ini juga bertujuan untuk mempromosikan Pan-Islamisme, sebuah gerakan yang menganjurkan solidaritas antar negara-negara Islam dan memposisikan Istanbul sebagai pusat penting pengaruh khilafah dan gerakan-gerakan sufi.⁸

Konsepsi Sultan Abdul Hamid II tentang Pan-Islamisme berasal dari keyakinan mendalam akan potensi Islam sebagai kekuatan pemersatu. Sultan Abdul Hamid II melihatnya sebagai alat politik untuk menjalin ikatan yang kuat di kalangan internal umat Islam untuk memupuk solidaritas dan pemberdayaan kolektif yang kuat. Visi ini secara aktif berupaya memanfaatkan posisinya sebagai penguasa kekhalifahan untuk menggalang dukungan dan persatuan di antara komunitas Muslim secara global.

Inti dari strategi Sultan Abdul Hamid II adalah pengakuan Islam sebagai kekuatan yang diperhitungkan secara politik dalam negeri. Ia percaya bahwa dengan menekankan persatuan Islam, ia dapat memperkuat integritas teritorial dan kohesi internal di dalam pemerintahan Utsmaniyah. Pandangan strategis ini

⁸ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Sejarah Daulah Utsmaniyah, Faktor-Faktor Kebangkitan Dan Sebab Sebab Keruntuhannya* (Jakarta:Ummul Qura, 2017), 744-751

merupakan perubahan dan berbeda dari kesultanan-kesultanan sebelumnya yang menunjukkan keterbukaan lebih besar terhadap pengaruh dan ideologi Barat. Perbedaan dari sikap sultan-sultan sebelumnya ini menggarisbawahi kompleksitas dan kedalaman pemikiran politiknya, sehingga memicu minat ilmiah untuk mengeksplorasi nuansa dan implikasi kebijakan Pan-Islamisnya dalam kerangka pemerintahan Daulah Utsmaniyah.⁹

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, ditemukan perbedaan cara pandang Sultan Abdul Hamid II terhadap Eropa, khususnya dalam bidang politik. Salah satu aspek yang menonjol adalah penerapan Pan-Islamisme sebagai kebijakan utama kesultanan Utsmaniyah, yang menandai penyimpangan dari sultan-sultan periode sebelumnya yang menunjukkan penerimaan yang lebih besar terhadap pengaruh Barat. Perbedaan dalam pendekatan Sultan Abdul Hamid II yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut dengan menganalisis seluk-beluk kebijakan Pan-Islamismenya di pemerintahan Utsmani.

Hasil Kajian Dan Pembahasan

Pan-Islamisme dari segi etimologi merupakan perpaduan dua istilah berbeda "Pan," berasal dari bahasa Yunani yang berarti universalitas atau keseluruhan dan "Islamisme" yang berakar kata dari bahasa Arab (*al-islam, al-salam, al-silm*) berarti perdamaian, keamanan, ketaatan, dan kepatuhan kepada Islam.

Asal usul Pan-Islamisme sebagai sebuah istilah dapat ditelusuri kembali ke Gabriel Charmes, seorang jurnalis Prancis terkemuka yang tulisannya banyak meliput kekhalifahan Utsmaniyah dan signifikansinya. Charmes, yang tertarik dengan peran kekhalifahan Utsmaniyah dan reaksi Muslim terhadap kolonialisme. Dalam wacana Eropa, Pan-Islamisme identik sebagai upaya yang menganjurkan persatuan umat Islam yang lebih luas dan perlawanan terhadap kolonialisme dan pengaruh eksternal, merangkum beragam aspirasi umat Islam akan persatuan, identitas, dan perlawanan terhadap tekanan eksternal, sebuah konsep yang terus bergema dalam diskusi mengenai sejarah Islam, identitas

⁹ Nicho Pandawa, *Khilafah Dan Ketakutan Penjajah Belanda* (Bogor : Komunitas Literasi Islam, 2021),67

Muslim global dan dinamika geopolitik.

Konsep Pan-Islamisme dalam konteks perspektif Muslim Turki, mengungkapkan pendekatan multifaset untuk memupuk persatuan dan solidaritas di dunia Islam di bawah kepemimpinan khilafah Utsmaniyah. Visi persatuan Islam ini, yang dikenal sebagai *Ittihat-i Islam* atau *Birligi Islam* di kalangan sarjana Turki, memiliki akar sejarah yang dalam dan implikasi ideologis yang bergema selama berabad-abad. *Ittihat-i Islam*, yang berarti persatuan Islam, muncul sebagai inisiatif strategis di dalam kekhilafahan Utsmaniyah untuk mengkonsolidasikan komunitas Muslim secara global di bawah kerangka kepemimpinan yang kohesif.

Pan-Islamisme dipandang sebagai gagasan politik, terkait erat dengan upaya menjaga wilayah Utsmaniyah dari gangguan sekularisme dan pengaruh eksternal.¹⁰ Sarjana seperti Bruce Master dan Gabor Agoston menyoroti Pan-Islamisme bukan sekadar sebuah ide, melainkan sebuah gerakan dan kebijakan komprehensif yang bertujuan untuk menggalang umat Islam, baik di dalam maupun di luar kekuasaan Utsmaniyah, untuk bersatu di bawah payung kekhilafahan Utsmaniyah. Gerakan ini berkembang sebagai respon terhadap kolonialisme Eropa yang mengancam kedaulatan dan otonomi umat Islam di berbagai wilayah di luar kesultanan Utsmaniyah.¹¹

Latar Belakang Kebijakan Politik Pan-Islamisme

Beberapa alasan utama yang melatarbelakangi munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II dapat dirumuskan berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Kekalahan perang berkepanjangan dan terus-menerus yang dihadapi oleh Daulah Utsmaniyah di masa pemerintahan sultan-sultan sebelumnya berdampak pada kemunduran Daulah Utsmaniyah. Seperti halnya serangan yang seringkali dilakukan oleh Rusia terhadap Daulah Utsmaniyah bahkan

¹⁰ Lukman Al-Hakim, Muhammad Faiz, "The Role of The Turkey Sekularization Movement in The Collapse of The Utsmani Empire", dalam *Jurnal Tasfiyah Pemikiran Islam*, Vol.5, No. 1, (2021)

¹¹ Abdul Somad, "Pemikiran Dan Pergerakan Pan-Islamisme Di Indonesia Pada Awal Abad Ke-20 Jurnal Pendidikan Dan Sejarah", dalam *Jurnal Pendidikan dan Sejarah* Vol, 1 No. 1, (2015)

sebelum Sutan Abdul Hamid II berkuasa yang telah melakukan penyerangan sejak abad ke XVIII. Pada saat dilantiknya Sultan Abdul Hamid II menjadi khalifah pada tahun 1876 M, Rusia telah melakukan berbagai macam persiapan dalam melakukan serangan terhadap Daulah Utsmaniyah. Rusia mempersiapkan strategi politik yang diperlukan dan menyelesaikan persiapan militer untuk menyatakan perang terhadap Daulah Utsmaniyah, sehingga puncaknya Rusia resmi menyatakan perang terhadap Turki Utsmaniyah pada tanggal 24 April 1877.¹²

Akibatnya, banyak wilayah kekuasaan Daulah Utsmaniyah yang berhasil di taklukkan. Setelah menguasai Laut Hitam, Rusia juga berencana merebut sebagian Anatolia hingga Teluk Iskandaria di Laut Mediterania. Para tentara Rusia itu berhasil merebut Dobruja, Zishtovi, dan Tirnova, serta membantai sebagian besar penduduk Muslim yang ada disana.¹³ Dinasti Turki Utsmaniyah banyak kehilangan wilayah kekuasaan, wilayah yang ada di belahan Eropa tidak tersisa kecuali wilayah Thrace Timur, dengan luas keseluruhan berkisar 60.000 mil persegi dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta orang.

Dampak lain yang terjadi akibat peperangan ini ialah lepasnya wilayah Bulgaria yang sebelumnya mendapatkan hak untuk menjalankan urusan di dalam negerinya sendiri, yang mana Bulgaria telah berada di dalam wilayah kekuasaan Turki Utsmani sejak lima abad lamanya. Pembebasan Bulgaria ini ditandai dengan Perjanjian Saint Stefanos yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1878 M dengan kesepakatan bahwa Rusia menyepakati perjanjian ini hanya sementara dan dapat dirubah.

Merasa iri dengan perolehan teritorial Rusia yang besar itu, maka Inggris, Austria dan Prusia meminta untuk segera diadakan kongres di Berlin. Hasil akhir dari perang Rusia-Osmani ini menegaskan bahwa Daulah Utsmaniyah harus mengakui kemerdekaan Bulgaria, Rumania, Serbia, dan Montenegro, sedangkan wilayah Utsmaniyah yang lain seperti Kars dan Bantun menjadi

¹² Rahmawati, R. K, "Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II di Daulah Utsmaniyah (1876-1909 M)" dalam *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol, 1 No. 1, (2017),193-211

¹³ Prof. Dr. Mehmet Maksudoglu, *The Unthold History of Ottoman* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2023), 333

wilayah kekuasaan Rusia.

Selain perang antara Rusia-Osmani, beberapa perang yang terjadi di masa akhir kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II ialah perang Balkan I dan II yang terjadi pada tahun 1912-1913. Bahkan akhir perang Balkan mencatatkan kekalahan umat Islam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyaknya kekalahan perang ini menyebabkan Daulah Utsmaniyah semakin mengalami kemunduran.

2. Faktor Eksternal

Di antara sebab lain yang melatarbelakangi munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II ialah masuknya pemikiran Barat dalam kekhilafahan Turki Utsmaniyah, utamanya sekularisme. Membahas mengenai sekularisasi di tubuh Turki Utsmaniyah, dapat terlacak dari dari era *Tanzimat* (pembaharuan) yang dilakukan pada masa Sultan Abdul Majid I pada tahun 1839 M hingga runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmaniyah dan seiring berdirinya negara Republik Turki pada tahun 1924 M.

Konsep sekularisasi mempunyai dua makna utama: pertama, proses yang mengarah pada kehidupan yang terputus dari pengaruh agama dan kedua, konversi properti milik negara untuk penggunaan alternatif. Sekularisme, di sisi lain, mewakili pendirian atau perspektif filosofis yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip moral tidak harus berasal dari doktrin agama.

Ideologi sekuler menganjurkan pemisahan lembaga keagamaan dari pemerintahan negara, mengedepankan sikap netral di mana keputusan didasarkan pada rasionalitas, etika, dan kesejahteraan masyarakat daripada dogma agama. Pendekatan ini berupaya menciptakan ruang inklusif di mana individu dengan keyakinan berbeda dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam kerangka yang menghormati kebebasan dan hak individu yang terlepas dari afiliasi agama.¹⁴

Evolusi sekularisme di kesultanan Utsmaniyah berlangsung secara bertahap, awalnya ditandai dengan proses transformatif yang terbentuk

¹⁴ Fadlurrahman Ashidiqi, "Problem Doktrin Sekularisme", dalam *Jurnal Kallimah*, Vol. 12, No. 2, (2014), 216

terutama pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid I. Perjalanan transformasi ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik dan tekanan eksternal, terutama dari negara-negara Barat yang berupaya untuk mencapai tujuan sekularisasi ini dengan mengerahkan pengaruhnya pada saat Sultan Abdul Majid I menduduki jabatan khalifah di usia yang masih sangat muda, yakni baru 16 tahun.

Akses ke kekuasaan yang lebih awal ini memberikan peluang bagi kekuatan eksternal, terutama negara-negara Barat untuk menjalankan agenda mereka di wilayah Utsmaniyah. Era ini menyaksikan perpaduan manuver politik yang diatur oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang menganjurkan modernisasi dan reformasi gaya Barat. Di antara tokoh-tokoh berpengaruh ini adalah Mustafa Rasyid Pasha yang menonjol karena pendekatan inovatifnya.

Di bidang politik, efek dari adanya sekularisasi ini adalah upaya kebijakan dalam penghapusan syari'at Islam sebagaimana dipraktikkan lama oleh masyarakat Turki. Kebijakan ini dilakukan dengan memisahkan urusan politik dengan agama. Dampak sekularisasi kemudian semakin tampak dirasakan ketika umat Islam di Turki tidak lagi memandang agama sebagai sesuatu yang penting dan membentuk kehidupan menjadi liberal, mendorong kebebasan atas nama hak asasi manusia yang dijadikan sebagai tameng dalam kehidupan yang semakin jauh dari syari'at.

Sedangkan dalam bidang Pendidikan, pada masa Sultan Abdul Majid I, Muhammad Ali yang saat itu memerintah Mesir, melakukan reformasi pendidikan dengan mendatangkan guru-guru dan ilmuan dari Eropa sehingga membuka lebar penyebaran pemikiran sekuler di Mesir yang berada dalam wilayah kekuasaan Utsmaniyah saat itu. Pada masa itu juga banyak pelajar yang dikirim ke Eropa, seperti ke Italia, Inggris, dan Prancis. Selain itu, proyek penerjemahan-penerjemahan buku berbahasa Eropa ke dalam bahasa Arab dilakukan secara masif yang mengandung doktrin nasionalisme, demokrasi dan pelbagai perspektif barat lainnya masuk ke dunia Islam.¹⁵

¹⁵ Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 58-62

Gerakan sekularisasi di masa kesultanan Utsmaniyah bukanlah sebuah fenomena tersendiri, melainkan sebuah proses multifaset yang dipengaruhi oleh berbagai gerakan ideologi dan kekuatan eksternal lain. Salah satu pengaruh signifikan dari gerakan ini adalah dampak Zionisme dan Freemasonry yang keduanya berkontribusi pada penyebaran cita-cita sekuler dalam pemerintahan dan masyarakat Utsmaniyah. Gerakan Freemasonry ini memberikan pengaruh yang besar khususnya di kalangan pejabat tinggi pemerintahan Utsmaniyah.

Melalui dukungan Barat terhadap nilai-nilai sekularisme sebagai simbol kemajuan Barat, Freemason menggoda banyak pejabat untuk mengadopsi ideologi sekuler yang menyebabkan terkikisnya nilai-nilai kearifan budaya Turki dan Islam secara bertahap dalam eselon tertentu dalam masyarakat Utsmani. Pergeseran internal ini menciptakan faksi-faksi di dalam pemerintahan yang secara aktif menentang pemerintahan Islam tradisional, sehingga semakin memperburuk ketegangan dan perpecahan ideologis.

Dinamika ini juga ditambah dengan munculnya Gerakan Turki Muda, yang mendapatkan momentumnya pada tahun 1865 M. Gerakan ini menganut perpaduan ideologi sekuler, liberal dan nasionalis yang mencerminkan kecenderungan yang lebih luas menuju modernisasi dan Westernisasi. Seiring dengan berkembangnya ideologi-ideologi ini turut membawa perubahan signifikan pada tatanan masyarakat dan lanskap politik Turki yang menandakan pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai Islam tradisional. Munculnya doktrin sekularisme di dunia Islam pada masa kolonial juga memainkan peran penting dalam membentuk sikap terhadap agama dan pemerintahan.

Pendudukan Perancis di Mesir pada tahun 1798 M menandai titik balik, diikuti oleh dominasi Inggris sejak tahun 1882 M dan seterusnya. Kekuatan kolonial ini tidak hanya menerapkan kontrol politik namun juga mempengaruhi elit terpelajar dan secara efektif menggunakan mereka sebagai saluran untuk menyebarkan ideologi sekuler yang sejalan dengan agenda kolonial mereka. Sedangkan Inggris sendiri merupakan negara yang memiliki pandangan yang berbeda dengan Usmaniyah, sehingga pemikiran ala Inggris tidak dapat dijadikan satu pandangan dengan peradaban Islam.

Di Mesir gelombang pengaruh Inggris melanda kalangan terpelajar, membentuk pola pikir banyak cendekiawan terpesona oleh doktrin nasionalisme dan patriotisme yang bertujuan untuk membebaskan bangsanya dari kekuasaan kolonial Inggris. Gelombang semangat nasionalisme ini mencapai puncaknya dengan kemenangan Mesir atas Inggris yang melambangkan kebebasan baru dari dominasi eksternal, termasuk kekuasaan kesultanan Utsmaniyah. Namun, Sultan Abdul Hamid II tidak acuh terhadap semangat perlawanan yang muncul di kalangan intelektual Mesir.

Menyaksikan kebangkitan elit intelektual Mesir, Sultan Abdul Hamid II berusaha untuk kritis terhadap pemikiran Barat. Ia memahami bahwa pemahaman yang berbeda terhadap ideologi Barat sangatlah penting, terutama dalam melawan penafsiran kasar yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya. Abdul hamid menekankan bahwa kedaulatan dan ketahanan Islam yang otentik berasal dari hubungan yang mengakar dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.

Oleh karena itu, upaya Sultan Abdul Hamid II tidak hanya bersifat reaktif namun juga proaktif dengan berupaya menavigasi medan pengaruh Barat yang kompleks sembari memperkuat kekuatan cita-cita dan kedaulatan Islam yang abadi. Kebijakan strategisnya dengan Pan-Islamisme mencerminkan visi yang lebih luas dalam menjaga prinsip-prinsip Islam dan membina persatuan di kalangan umat Islam secara global.

Dari belahan Eropa yang lain, Perancis menduduki Mesir pada tanggal 1 Juli 1798 M, atas kendali dari Napolenon meski kemudian akhirnya Napoleon meninggalkan Mesir setelah mengalami kekalahan dalam melawan armada Inggris pada tanggal 31 Agustus 1801 M. Pasukan Inggris mendarat di Alexandria, mengalahkan Mesir di Tell-el Kebir pada tanggal 13 September 1882 M dan kemudian empat hari kemudian Inggris menduduki Kairo.¹⁶

Selama era pemerintahan kolonial Inggris di Mesir, Mesir mengalami transformasi besar di berbagai bidang, meliputi pemerintahan, dinamika militer

¹⁶Prof. Dr. Mehmet Maksudoglu, *The Unthold History of Ottoman* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2023), 340

dan respons masyarakat terhadap dominasi eksternal. Dampak kolonialisme Inggris terhadap Mesir sangat beragam sehingga memicu berbagai reaksi dan perlawanan dari para intelektual Mesir dan masyarakat luas. Di tengah kondisi yang dinamis ini, Mesir menyaksikan gelombang upaya perlawanan yang bertujuan menantang otoritas kolonial Inggris.

Tokoh-tokoh intelektual muncul sebagai garda depan perubahan, menggunakan kekuatan pengetahuan dan gagasan dalam upaya mereka untuk membebaskan Mesir dari kendali asing. Tokoh-tokoh terkemuka seperti Lutfi al-Sayyid, Saad Zaghloul dan Mustafa Kamil muncul sebagai tokoh reformis yang sangat penting, masing-masing memberikan kontribusi penting dalam perjuangan kedaulatan Mesir. Gerakan reformasi yang dipimpin oleh para intelektual ini memiliki ciri pendekatan yang beragam, memadukan semangat keagamaan dengan nasionalisme sekuler dalam upaya mereka mencapai emansipasi Mesir.

Saad Zaghloul, misalnya, melambangkan komitmen ganda ini dengan memperjuangkan nilai-nilai agama dan cita-cita nasionalis sekuler dalam perjuangan melawan imperialisme Inggris.¹⁷ Tanpa disadari, para cendekiawan serta kaum Intelektual Mesir menjadi dakon permainan menarik oleh tangan Inggris dan pada sisi lain menghancurkan potensi kekuatan wilayah Islam sekaligus kekhalifahan Islam.

Maka dari itu kemudian Sultan Abdul Hamid II tidak tinggal diam dan berusaha meluruskan pandangan masyarakat Mesir mengenai ajaran nasionalisme yang diajarkan secara mentah oleh Inggris. Abdul hamid berusaha meluruskan kembali pemahaman masyarakat Mesir dengan menyadarkan akan pentingnya persatuan Islam dalam melawan penjajahan pemikiran dan penjajahan fisik yang dilakukan oleh Inggris terhadap Mesir.

Maka dari itu, Sultan Abdul Hamid II mulai mengenalkan gagasan Pan-Islamisme pada kaum terpelajar Mesir meski dirasa solusi di gaungkannya ide Pan-Islamisme tidak cukup kuat di tengah situasi yang genting. Akan tetapi

¹⁷ Putri, "Pengaruh Pan Islamisme Terhadap Kehidupan Bangsa Mesir Tahun 1897-1922", dalam *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, (2013), 8

Sultan Abdul Hamid II mengungkapkan kepercayaan dan optimismenya terhadap persatuan Islam karena menurutnya agama merupakan cara penting dalam mempertahankan kedaulatan Islam dan kekhilafahan Islam yang menghadapi banyak tantangan ketika itu.

Kesimpulan

Kebijakan politik Pan-Islamisme Dinasti Turki Utsmaniyah pada masa Sultan Abdul Hamid II (1876-1909 M) merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan negara yang tengah mendera dengan cara mengkampanyekan persatuan umat Islam di dalam satu kekuasaan kekhilafahan. Di antara faktor yang melatarbelakangi munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II adalah karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dilatari oleh kemunduran pasca kekalahan perang. Sedangkan faktor eksternal dari munculnya kebijakan politik Pan-Islamisme Sultan Abdul Hamid II dilatari masuknya pemikiran Barat utamanya Westernisasi dan sekularisasi di dalam Daulah Utsmaniyah serta meningkatnya kolonialisasi Barat terhadap negeri-negeri Muslim.

Referensi

- Al-Hakim, Lukman. Faiz, Muhammad. "The Role of The Turkey Sekularization Movement in The Collapse of The Utsmani Empire", dalam *Jurnal Tasfiyah Pemikiran Islam*, Vol.5, No. 1, 2021.
- Ashidiqi, Fadlurrahman. "Problem Doktrin Sekularisme" dalam *Jurnal Kallimah*, Vol. 12, No. 2, 2014.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Sejarah Daulah Utsmaniyah, Faktor-Faktor Kebangkitan Dan Sebab Sebab Keruntuhannya*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.
- Hasan, Masudul. *History of Islam: Classical Period 1206-1900 C.E*. Delhi: Adam Publisher and Distributer, 1995.
- Inalcik, Halil. *The Utsmani Empire: The Classical Age 1300-1600*. London: Phoenix, 1995.
- Maksudoglu, Mehmet. *The Unthold History of Ottoman*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Al-Nahbani, Taqi al-Din. *Al-Dawlah Al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Ummah, 2002.
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*. Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2013.
- Pandawa, Nicho. *Khilafah Dan Ketakutan Penjajah Belanda*. Bogor : Komunitas Literasi Islam, 2021.

- Peacock, Andrew. *From Anatolia to Aceh*. Oxford University Press, 2015.
- Putri. "Pengaruh Pan Islamisme Terhadap Kehidupan Bangsa Mesir Tahun 1897-1922", dalam *Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 2013.
- R. K, Rahmawati. "Studi Historis Kebijakan Luar Negeri Sultan Abdul Hamid II Di Daulah Utsmaniyah (1876-1909 M)", dalam *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol, 1 No. 1, 2017.
- Rusli, Ris'an. *Pembaharuan Pemikiran Modern dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Somad, Abdul. "Pemikiran Dan Pergerakan Pan-Islamisme Di Indonesia Pada Awal Abad Ke-20", dalam *Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, Vol, 1. No. 1, 2015.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.